

ORGANISASI GERAKAN SOSIAL (STUDI : SERIKAT TANI RIAU DALAM MENGADVOKASI KEPENTINGAN MASYARAKAT PULAU PADANG)

By:

Yoshep Saputra

yoshepsaputra@yahoo.com

Consuller:

Dr. Hasanuddin, M.si

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau, Pekanbaru

Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax .0761-63272

Abstract

This study used a qualitative descriptive method. Research location in the village of Padang Island District of Merbau Meranti Islands District to focus research on the conflict between Padang and PT Society Islands. RAPP, In 2009 PT.RAPP have obtained the addition or expansion of Utilization License Timber Forest Products Forest Plants (IUPHHK-HT) through Decree SK.327 / Menhut-II / 2009 on June 12, 2009 covering an area of 115 025 ha. So when this area of PT.RAPP is 350 165 hectares, including an area of 41 205 hectares ereal located on the island of Padang. 41 205 hectares of land is the one who in the community problem in Padang Island

Based on research conducted by the authors of the Conflict Padang Island, people refuse beroprasinya PT.RAPP in Padang Island neighborhood by performing various kinds of protest to the company up to the central government. As for the actions that are carried out demonstrations, mouth sewing action, the action of self-immolation threat to the President, Establishment of the monument as a form of rejection PT.RAPP in Pulau Padang.:. Solutions conflict settlement between the company PT.RAPP is already in promise promised by the government such as conciliation and mediation. But the events that have occurred since the end of 2009 until today has not been resolved and have not found a point he explained.

Riau Farmers Union (STR) plays an important role in the fight for rights - the rights of farmers Riau specifically concerning the conflict this Padang Island, as for the efforts that have been made in the fight and advocate STR Padang Island community by performing radicalization, Expansion Structure / Branches and Building Unity - Unity (front - front) Democratic.

Keyword: Social Organisation, Social Conflict, Pulau Padang

PENDAHULUAN

Jika kita melihat secara historis Gerakan Sosial adalah sebuah fenomena yang universal. Rakyat diseluruh masyarakat manusia tentu mempunyai alasan untuk bergabung dan berjuang demi mendapatkan tujuan kolektif mereka dan secara bersama-sama menentang orang-

orang yang brani menghalangi tujuan mereka.Begitu juga yang terjadi di Batubara.

Gerakan Sosial termasuk istilah baru dalam kamus ilmu-ilmu sosial.Meskipun demikian di lingkungan yang sudah modern seperti di Indonesia fenomena munculnya gerakan social

bukanlah hal aneh. Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan ormas bahkan Parpol yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis maka masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan system atau struktur yang cacat. Dari kasus itu dapat kita ambil semacam kesimpulan sementara bahwa gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan sosial itu lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotan.

Jika tuntutan itu tidak dipenuhi maka gerakan sosial yang sifatnya menuntut perubahan institusi, pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan terpenuhinya permintaan gerakan sosial. Sebaliknya gerakan sosial itu bernafaskan ideology, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah. Namun dari literature definisi tentang gerakan sosial ada pula yang mengartikan sebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan sosial itu muncul dari masyarakat tetapi bias pula hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa. Jika definisi digunakan maka gerakan sosial tidak terbatas pada sebuah gerakan yang lahir dari masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintah tapi juga gerakan yang berusaha mempertahankan kemauannya. Jika ini memang ada maka betapa relatifnya makna gerakan sosial itu sebab tidak selalu mencerminkan sebuah gerakan murni dari masyarakat.

Di Indonesia, gerakan sosial tak kurang pula gebraknya, tak perlu berlebihan pula jika dikatakan bahwa Gerakan Sosial merupakan bagian terpenting serta tak terpisahkan dari perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Kemerdekaan Indonesia itu sendiri, pada dasarnya tidaklah semata-mata muncul dari gerakan bersenjata, tapi juga lewat gerakan sosial, yang tumbuh sebagai manifestasi dari kesadaran sejumlah kaum muda, waktu itu, akan realitas.

Gerakan sosial lahir dari situasi yang dihadapi masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kata lain gerakan sosial lahir sebagai reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkannya atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak adil. Biasanya gerakan sosial seperti itu mengambil bentuk dalam aksi protes atau unjuk rasa di tempat kejadian atau di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat atau gedung pemerintah. Setelah Mei 1998, gerakan sosial semakin semarak dan ketidakadilan dan ketidakpuasan yang muncul jauh sebelum 1998 dibongkar untuk dicari penyelesaiannya. Situasi itu menunjukkan bahwa dimana system politik semakin terbuka dan demokratis maka peluang lahirnya gerakan sosial sangat terbuka.

Berbagai gerakan sosial dalam bentuk LSM dan Ormas bahkan Parpol yang kemudian menjamur memberikan indikasi bahwa memang dalam suasana demokratis maka masyarakat memiliki banyak prakarsa untuk mengadakan perbaikan system atau struktur yang cacat. Dari kasus itu dapat kita ambil semacam kesimpulan sementara bahwa gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah.

Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks

masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan social itu lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi maka gerakan social yang sifatnya menuntut perubahan institusi, pejabat atau kebijakan akan berakhir dengan terpenuhinya permintaan gerakan social. Sebaliknya jika gerakan social itu bernafaskan ideologi, maka tak terbatas pada perubahan institusional tapi lebih jauh dari itu yakni perubahan yang mendasar berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga sebagai bagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang ini adalah perbaikan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu di ganti.

Serikat Tani Riau yang disingkat dengan STR adalah Organisasi Massa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Organisasi ini bersifat local, terbuka, legal, progresif, radikal dan kerakyatan

yang berkedudukan di ibukota Propinsi Riau.

Tujuan STR secara umum adalah untuk mewujudkan system Masyarakat Demokratis yang pro-rakyat dan secara khusus adalah untuk memerdekakan kaum Tani dari penghisapan dan penindasan dengan menggerakkan dan memimpin perjuangan kaum tani dan masyarakat adat bagi terselenggaranya reforma agrarian sejati dengan dukungan gerakan rakyat juga membangun gerakan Kaum Tani dalam perjuangan demokratis menuju masyarakat demokratis yang pro-rakyat dan turut aktif dalam membangun gerakan Rakyat yang memperjuangkan masyarakat dan berlandaskan demokrasi dan kerakyatan.

STR didirikan dalam Konferensi Komite Perjuangan Pembebasan Tanah Rakyat Riau yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret- 1 April 2007 di Aula BKKK Propinsi Riau, Kota Pekanbaru.

Sejauh ini, sepak terjang Serikat Tani Riau cukup memiliki pengaruh yang besar dalam memperjuangkan hak-hak para petani seperti salah satunya menggelar aksi demo di samping kantor Gubernur Riau, jalan Cut Nyak Dien pada tanggal 25 November 2014. Sekitar seratusan masa yang berlangsung sejak pagi tersebut menuntut Surat Keputusan No. 327/2009 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada RAPP pada pertengahan 2009 di Pulau Padang segera dicabut. Sebab hal tersebut telah merugikan masyarakat. Lebih dari 2000 hektare hutan milik warga di Pulau Padang habis dibabat PT. RAPP.

Sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang, sejak Desember 2009 lalu hingga saat ini secara berkesinambungan melakukan penolakan atas beroperasinya PT. RAPP. penolakan dengan berbagai cara sudah tempuh, baik tingkat kabupaten, propinsi dan bahkan sampai adanya aksi jahit mulut dan kemah massal masyarakat Pulau Padang di Depan Gedung DPR RI. Namun hingga kini

belum terlihat adanya tanggung jawab pemerintah.

Dalam aksi ini, korlap yang mewakili massa juga meminta pemerintah agar membebaskan lahan seluas 41.250 di Pulau Padang dari area konsensi PT. RAPP dan PT. SRL dan mengharapkan pemerintah segera melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 tentang kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan dalam pragraf sebelumnya, maka menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Organisasi Gerakan Sosial (studi : Serikat Tani Riau Dalam Mengadvokasi Masyarakat Pulau Padang Kabupaten Meranti Pada Tahun 2012-2013)”**

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah yang telah disesuaikan dalam penelitian ini yaitu:

“Bagaimana organisasi Serikat Tani Riau (STR) dalam mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak petani Riau tahun 2012-2013?”

Kerangka Teori

1. Organisasi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga sebagai bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti.

Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas dan Anggaran Rumah Tangga yang disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.

2. Gerakan Sosial

Gerakan Sosial (social Movement) memiliki pemaknaan yang beraneka ragam, para sarjana berbeda pendapat mengenai apa itu gerakan social dan bagaimana cara mempelajarinya. Beberapa sarjana menekankan aspek organisasi dan tujuan dari gerakan-gerakan social. Michael Useem, misalnya, mendefinisikan gerakan social sebagai tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksud untuk mengadakan perubahan social. John McCarthy dan Mayer Zald menjelaskan lebih rinci, dengan mendefinisikan gerakan social sebagai upaya terorganisasi untuk mengadakan perubahan didalam distribusi hal-hal apa pun yang bernilai secara social. Sedang Charles Tilly menambahkan corak perseteruan (contentious) atau perlawanan di dalam interaksi antara gerakan social dan lawan-lawannya. Dalam defenisinya, gerakan-gerakan social adalah upaya-upaya mengadakan perubahan lewat interaksi yang mengandung perseteruan dan berkelanjutan di antar warga Negara dan Negara.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Gerakan Sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai

program. Secara teoritis Gerakan Sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Di sini terlihat tuntutan perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Karena gerakan social lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun ditubuh pemerintah menjadi sorotannya. Dari literature defenisi tentang gerakan social, ada pula yang mengartikan gerakan social ebagai sebuah gerakan yang anti pemerintah dan juga pro pemerintah. Ini berarti tidak selalu gerakan social itu muncul dari masyarakat tapi bias juga hasil rekayasa para pejabat pemerintah atau penguasa.

Jurgen Habermas, sebagaimana dikutip oleh Pasuk Phongpaichit (2004) menyatakan bahwa gerakan social hubungan defensive individu-individu untuk melindungi ruang public dan private mereka dengan melawan serbuan dari system Negara dan pasar.

Anthony Giddens menyatakan Gerakan Sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif (action collective) diluar ruang lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Sedangkan Mansoer Fakhri menyatakan bahwa gerakan social dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan social terutama dalam usaha merubah sturktur maupun nilai social. Sejalan dengan pengertian gerakan social di atas, Herbert Blumer merumuskan Gerakan Sosial sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama ats nama sejumlah tujuan atau gagasan. Robert Misel dalam bukunya yang berjudul teori pergerakan Sosial mendefenisikan Gerakan Sosial sebagai seperangkat keyakinan dan tindakan yang tak terlembaga yang dilakukan oleh

sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan dalam masyarakat.

David Mayer dan Sidney Tarrow, dalam karya mereka social Movement Society (1998). Memasukkan semua ciri yang sudah disebutkan di atas dan mengajukan sebuah defenisi yang lebih inklusif tentang gerakan social, yakni: tantangan-tantangan bwersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam nteraksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan atau musuh, dan pemegang otoritas.

3. Organisasi Gerakan Sosial

Organisasi gerakan social adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan sekelompok masyarakat yang tergabung dalam sebuah system yang terstruktur dan disertai program terencana yang ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untk melestarikan pola-pola dan lembaga masyarakat yang ada.

Dalam sosiologi, gerakan tersebut di atas diklarifikasikan sebagai suatu bentuk prilaku kolektif tertentu yang diberinama gerakan social. Sejumlah ahli sosiologi menekankan pada segi kolektif dan gerakan social ini, sedangkan di antara mereka ada pula yang menambahkan segi kesengajaan, organisasi dan kesinambungan. Sebagai sebuah aksi kolektif, umur gerakan social tentu sama tuanyadengan perkembangan peradaban manusia. Perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalam “damai” bahkan sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau yang lebih dikenal dengan istilah gerakan social sekarang ini (Situmorang, 2007)

Gerakan social lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan social lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat atau menginginkan perubahankebijakan karena

dinilai tidak adil. Gerakan secara merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Disini terlihat tuntutan perubahan itu lahir karena dinilai tidak adil. Gerakan secara merupakan gerakan yang lahir dari prakarsa masyarakat dalam menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintahan. Disini terlihat tuntutan perubahan itu lahir karena melihat kebijakan yang ada tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Gerakan social itu dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Jadi ada sekelompok besar rakyat yang terlibat secara sadar untuk menuntaskan sebuah proses perubahan social. Selanjutnya gerakan ini gelombang pergerakan dari individu-individu, kelompok yang mempunyai tujuan yang sama yaitu suatu perubahan social indikasi wal untuk menangkap gejala social tersebut dalam dengan mengenali terjadinya perubahan-perubahan pada semua elemen arena politik dan ditandai oleh kualitas "aliran" atau "gelombang". Dalam prakteknya suatu gerakan social dapat diketahui terutama lewat banyak organisasi baru yang terbentuk, dan bertambahnya anggota dalam suatu organisasi gerakan.

Selain itu menurut Lofland dua aspek empiris gelombang yang perlu diperhatikan adalah pertama aliran tersebut cenderung berumur pendek antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati umur itu gerakan akan melemah dan meskipun masih ada akan tetapi gerakan telah mengalami proses 'cooled down'. Kedua, banyak organisasi gerakan atau protes yang berubah menjadi gerakan social atau setidaknya bagian dari gerakan-gerakan tersebut diatas. Organisasi-organisasi ini cenderung selalu berupaya menciptakan gerakan social atau jika organisasinya berbeda maka mereka akan dengan sabar menunggu. Pergeseran

struktur makro yang akan terjadi (misalnya krisis kapitalis) atau pertarungan yang akan terjadi antara yang baik dengan yang jahat, atau kedua hal tersebut. Serta menunggu kegagalan fungsi lembaga sentral, kala itulah gerakan itu bias dikenali sebagai gerakan pinggiran, gerakan awal dan embrio gerakan. (lofland. 2003:50)

Perlu diperhatikan juga ada beberapa factor pengaruh terhadap jalannya gerakan social, gagasan ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini. Aspek mikro (Internal diri factor) Aspek makro (Eksternal diri actor) ideology diri kondusivitas structural Nilai-nilai diri ketegangan structural perspektif memandang suatu fenomena penyelenggaraan pemerintah sumber daya diri strategi pembangunan.komitmen diri situasi dan kondisi yang sedang berlansung sumber: (wahyudi, 2005:198) maka dari itu, gerakan social dapat dikategorikan sebagai sebuah manifestasi kepentingan orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan dari adanya kekuasaan secara structural Negara. Sehingga mengambil jalan untuk mewujudkan tuntutan dengan berbagai macam metode perlawanan yang disajikan, mulai dari yang bersifat tat atas hukum sampai kepada sebuah usaha yang radikal progresif dalam payung hukum yang abnormal dalam implementasinya. Walaupun nantinya konsekuensinya yang akan terjadi harus melibatkan semua potensi material yang telah dimiliki oleh para pelaku gerakan social itu sendiri, baik harta, tenaga maupun nyawa sekalipun untuk mewujudkan keadilan bagi semua orang.

4. Gerakan Sosial Petani

Pengertian petani dalam tulisan ini lebih merujuk pada *peasant* dan bukan *farmer*. Istilah *Peasant* diterjemahkan sebagai buruh tani atau petani yang tidak memiliki lahan, atau petani yang hasil produksinya hanya dapat untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Bukan untuk diperdagangkan apalagi untuk

pemenuhan kebutuhan tersier. Sedangkan istilah *farmer*, lebih diberi pengertian sebagai petani yang memiliki lahan sendiri, petani yang hasil produksinya sudah berlebih jika hanya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder saja.

Masyarakat petani merupakan bagian dari system yang luas. Tahap kehidupannya merupakan bagian dari system social yang lebih makro, seperti: system social dalam kemasyarakatan, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya yang ada di sekitarnya. Petani akan selalu mengalami dinamika kehidupan. Mereka senantiasa terkait dengan perubahan social, dimana salah satu caranya adalah dengan gerakan petani. Gerakan ini bukan sekedar sebagai suatu reaksi tetapi juga sebagai wahana untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan.

Di kalangan petani berkembang anggapan, bahwa tidak banyak pihak yang bersedia membantu secara penuh untuk membantu mengentaskan mereka dari posisi keterpurukannya. Dalam perspektif Marxis, hal ini pernah dikatakan oleh V.I Lenin (1972): (hanya ada satu cara untuk melakukan reformasi agrarian, dimana hal itu tidak dapat di hindarkan di Rusia sekarang ini, yakni memainkan peran demokrasi yang revolusioner: hal itu harus berdampak pada inisiatif revolusioner dari diri petani itu sendiri)

Satu hal yang dapat di tangkap dari pemikiran ini adalah bahwa hanya satu pihak yang dapat mengambil inisiatif revolusioner untuk melakukan reformasi agrarian, yaitu petani itu sendiri. Kesadaran semacam ini juga ada dikalangan petani Riau. Oleh sebab itu, para petani lantas mengorganisir diri untuk melakukan gerakan.

Gerakan petani merupakan salah satu jenis dari gerakan social, artinya gerakan petani adalah gerakan social yang dilakukan oleh petani. Gerakan social- termasuk di dalamnya gerakan petani- merupakan gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara kolektif, terus menerus dan atau sistematis dengan tujuan

untuk mendukung atau menentang keberlakuan tata kehidupan tertentu. Dimana mereka memiliki kepentingan di dalamnya, baik secara individu, kelompok, komunitas, atau level yang lebih luas lagi.

Gerakan petani merupakan gerakan yang bersifat reformatif (Kamanto Sunarto, 2000-2004), karena ia hanya menghendaki perubahan terhadap sebagian sistem yang melingkupi kehidupannya. Gerakan petani bias digolongkan kedalam tipe gerakan tipe lama (Song Ho Keun, 2000:95-130), tetapi dapat juga masuk kedalam kategori sebagai gerakan baru. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Charles Tilly (1998:454), yang mana dalam kategorinya gerakan petani dapat masuk dalam gerakan fase kedua, yakni fase dimana gerakan sosial sering disebut proses politik, tindakan rasional, model mobilisasi sumber tentang tindakan kolektif, serta gerakan social itu sendiri.

Rosenthal, Fingrutd, dkk melihat bahwa setiap gerakan sosial itu memiliki hubungan khusus dengan organisasi gerakan sosial lain yang memiliki misi sama atau serupa. Ia melihat gerakan sosial yang terjadi di pusat lebih ideologis dari pada gerakan di tingkat local. Sementara itu, Maxime Molineux (1998) dalam karyanya *Analysing Women's Movement* menyebutkan bahwa gerakan sosial itu dilakukan untuk meraih tujuan bersama. Gerakan sosial cenderung memerlukan dukungan jaringan. Menurut Keun (Song Hoo Keun, 2000), mobilisasi terhadap partisipan itu dapat dilakukan melalui mobilisasi personal maupun mobilisasi kognitif. Menurut Mao, nilai-nilai gerakan petani ini mudah terjadi di dunia ketiga, karena masyarakatnya merupakan representasi dari system yang "semi feodal". Penulis melihat, bahwa ternyata tujuan dari para aktor gerakan tidaklah selalu sama, melainkan cenderung berbeda. Diantara mereka ada yang mengejar materi (tanah), keuntungan ekonomi, keuntungan politik, maupun sekedar kepuasan ideologis semata.

a. Penyebab Gerakan Petani

Donald Zagoria mengatakan bahwa komersialisasi lahan pertanian menyebabkan petani menjadi lebih kritis dan revolusioner terhadap berbagai bentuk penghisapan yang mereka alami. Hal ini menemukan muaranya pada momentum reformasi. Susan Ekstein menengarai adanya dua penyebab, yakni :

- 1) perlawanan terjadi dikarenakan adanya ketidakadilan dan penindasan yang mereka alami tidak dapat diatasi oleh kaum petani, sementara respon institusi lokal, nasional serta kultural tetap saja kerung kondusif.

James C. Scott menyebutkan, bahwa perlawanan kaum petani sebagai akibat meluasnya peranan negara dalam proses transformasi pedesaan melalui revolusi hijau. Petani melakukan perlawanan terhadap kaum kaya dan hegemoni Negara dengan *everyday forms of resistance*.

Hotman M. Siahaan (1999: 60-70) menyebutkan bahwa proses petani dapat dilihat dari tiga factor, yakni akibat meluasnya komersialisasi lahan pertanian, berkembangnya nilai sistem baru, dan ambiguitas peran Negara dalam membuat pilihan harus reformis atau menindas petani. Sementara itu, Agus Sudibyo (ibid, 71-89) mengatakan bahwa perlawanan petani selalu didasarkan pada persoalan bahwa Negara, aparat keamanan dan pemilik modal telah mengambil alih secara paksa surplus ekonomi dari petani. Mereka bekerja sama dalam aksi penyerobotan tanah petani, dan pendirian perkebunan-perkebunan, serta dalam menghadapi gerakan protes petani.

Sedangkan Sergey Mamay mengatakan bahwa mekanisme kemunculan gerakan social adalah diawali dengan adanya tipe-tipe kontradiksi social tertentu. Dari sini kemudian terjadi ketidakpuasan yang terkait dengan kepentingan social tertentu, sehingga lahirlah kekuatan social yang diwadahi dalam gerakan social.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan gejala atau kenyataan yang ada sehingga data yang disimpulkan dalam penelitian akan dijelaskan dengan metode kualitatif.

Metode penelitian yang dipilih adalah studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Namun jika ditinjau dari sifat penelitian, penelitian harus lebih mendalam.¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya (Tanya jawab atau Wawancara) dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah dalam penelitian. Penulis menentukan *key Person* terlebih dahulu, kemudian untuk memperluas informasi sampel berikutnya dipilih dengan menggunakan teknik Bola Salju (*Snow Ball*). Untuk memperoleh kelengkapan data dan informasi, maka penulis juga menggali informasi dari pihak-pihak diluar unit analisis yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian. Data ini diperoleh melalui studi pustaka seperti artikel-artikel, dokumen, media massa dan data-data terkait lainnya.

3. Informan

Yaitu sebagian unit yang dijadikan sasaran dalam wawancara untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam metode ini, informan bias saja berubah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan data atau informasi yang diperoleh.

¹Arikunto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar. Yogya, hal 131

Tabel. 1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Rinaldi	Sekretaris Jendral Serikat Tani Riau	1
2	Nazib	Pengurus STR Kecamatan Merbau	1
3	Irwan Saleh	Ketua Departemen STR	1
4	Mulyadi	Anggota Serikat Tani Riau Pulau Padang	1

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2015

4. Tehnik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (*Interview guide*). Peneliti berperan mengkomunikasikan pertanyaan-pertanyaan inti sebagaimana tertera dalam *interview guide* sehingga informan dapat memahami pertanyaan tersebut. Dalam wawancara mendalam ini dimungkinkan penulis dapat menggali lebih jauh jawaban informan dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang merupakan pengembangan dari pertanyaan inti yang di dalam *interview guide*.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala-gejala social yang relevan dengan obyek penelitian. Penulis menggunakan observasi non partisan, yakni peneliti tidak secara penuh mengambil bagian dari kehidupan yang diteliti. Penulis hanya mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap sikap, pendapat, pengetahuan, pemahaman, kegiatan, dan hal-hal lain yang sekiranya dapat mendukung penelitian.

c. Studi Pustaka

Suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mempelajari data-data obyek penelitian dari buku-buku literature, artikel-artikel, serta dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan.²

- a. Menelaah sumber data, yang dimulai dengan keseluruhan data yang tersedia dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka maupun sumber lain.
- b. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Melalui kegiatan ini, maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan langkah terakhir dari kegiatan analisis kualitatif. Penerapan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gerakan dan Konflik Lahan di Pulau Padang

Gerakan perlawanan petani di Pulau Padang yang muncul, tidak berbeda jauh dari karakteristik gerakan petani tradisional Jawa dan Daerah daerah lainnya. Gerakan gerakan perlawanan tersebut masih bersifat tradisional, lokal atau regional, berjangka waktu pendek, dan masih menggantungkan diri pada tokoh - tokoh lokal yang menjadi figur sentral gerakan.

²Drs. M. Manulang, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hal. 35

Pada masa ini, gerakan - gerakan petani masih berupa aksi - aksi protes damai, tanpa kekerasan, yang dilakukan secara sporadis, belum adanya pengorganisasian massa dalam jumlah besar, dan masih mengandalkan tokoh - tokoh masyarakat setempat atau elit - elit lokal yang dijadikan pemimpin dalam setiap aksi. Isu - isu yang menyatukan gerakan perlawanan mereka adalah persoalan ekonomi, yang didasarkan atas kepentingan tanah mereka yang sama - sama hilang karena digusur.

Corak gerakan perlawanan petani ini mengalami perubahan secara besar - besaran. Perubahan itu sangat terasa, terutama sejak 1998 yang berlanjut pada tahun 2005. Dalam periode ini gerakan perlawanan petani tidak hanya bercorak ekonomi, tetapi juga bercorak budaya yang kental terutama di daerah - daerah yang sistem masyarakat adatnya masih hidup, dan isu - isu yang dikembangkan bermuatan politik. Jadi isu - isu yang mempersatukan gerakan perlawanan petani ini, di samping persoalan ekonomi, adalah persoalan budaya dan politik.

Negara/tentara/pemodal dalam konstelasi itu, ditempatkan sebagai musuh bersama petani, karena dalam pandangan petani institusi - institusi inilah yang menyebabkan kehidupan petani terus memburuk.

Dalam kaitan itu, sejak pertengahan tahun 1980 - an, isu - isu politik (penindasan) agaknya menjadi isu sentral perjuangan, dan gerakan perlawanan petani mulai marak, yang bagaimana pun tidak bisa dilepaskan dari peran aktivis mahasiswa dan LSM yang mendampingi petani dalam menghadapi berbagai kasus penggusuran. Proses pendampingan ini agaknya telah "membuka mata" petani, bahwa musuh bersama mereka adalah negara/militer/pemodal besar.

Meskipun isu - isu atau masalah yang dihadapi petani seperti di Pulau Padang relatif sama di hampir seluruh wilayah Indonesia, jaringan kerja dan

jaringan antar gerakan petani belum terbangun pada tataran nasional. Sehingga isu - isu gerakan yang terjadi di hampir setiap wilayah terbangun sepotong - potong parsial, tidak "nyambung" antara satu komunitas petani dengan komunitas petani lainnya, apalagi dengan komunitas lain di luar sektor pertanian. Walaupun isu - isu yang dibangun untuk mengangkat persoalan petani selalu aktual dan strategis, tetapi dalam perkembangannya isu - isu tersebut dengan mudah tenggelam bersama arus besar "orde pembangunan".

Adapun bentuk dari konflik yang terjadi di Pulau Padang ini antara lain yaitu masyarakat memprotes kepada pihak perusahaan untuk segera menghentikan oprasional dikawasan areal konsesi di Pulau Padang, dimana protes tersebut dilakukan dengan berbagai macam aksi (Amrina Rosyada : 2013). Adapun aksi-aksi yang dilakukan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Aksi Demo
2. Aksi Jahit Mulut
3. Aksi Bakar Diri
4. Pendirian Tugu

B. Upaya Serikat Tani Riau (STR) Dalam Mengadvokasi Masyarakat Pulau Padang

Dalam hal perlawanan Serikat Tani Riau secara politik dan hukum ternyata yang lebih efektif dilakukan adalah cara politik, dimana cara politik bertujuan untuk mendidik massa Serikat Tani Nasional mengerti akan haknya atas tanah sehingga perlawanan melalui beberapa aksi yang mereka lakukan akan tergambar dalam benak kaum tani bahwa negara pada posisi berhadap - hadapan dengan kaum tani karena negara adalah refesentasi modal yang mewakili kepentingan tuan kapitalisme artinya negara merupakan penjaga modal yang pengabdianya seutuhnya bagi pembangunan modal bukan manusia.

Sehingga aksi dan perlawanan kaum tani yang telah terekam dalam penelitian ini menunjukkan betapa

kejengkelan mereka terhadap negara yang tidak pernah mengakomodir kepentingan mereka sebagai kelas tertindas. Sudah jelas bahwa posisi negara dalam berbagai konflik agraria yang ada termasuk di Desa Pulau Padang adalah pelaksana bagi kepentingan kelas penindas. Sehingga seperti kata Marx bahwa negara merupakan ekspresi dari kekuatan yang berdominasi (modal/borjuasi)

Perlawanan petani desa Pulau Padang telah melahirkan gerakan petani yang terstruktur dan terorganisir yang perjuangannya tidak lagi lokaistik dan sektoralistik namun telah membangun perjuangan multisektor dengan kelas tertindas lainnya seperti kaum buruh, kaum miskin perkotaan, mahasiswa, pemuda, dan perempuan yang dibangun dalam perlawanan skala nasional hingga internasional. Kontradiksi dalam kasus ini tentunya akan berdampak pada struktur sosial dalam masyarakat Desa Pulau Padang, dimana pemiskinan hingga kepedesaan akibat penetrasi modal yang direstui oleh negara. Melahirkan tatanan masyarakat yang terpuruk dalam kondisi ekonomi yang sangat akut. Satu - satunya jalan yang dilakukan oleh Petani Desa Pulau Padang dengan mendiskreditkan kekuasaan negara dengan terus melakukan perlawanan.

Jika ada radikalisme maka akan ada perluasan struktur dan memudahkan terbangunnya front - front persatuan. Juga bila terjadi perluasan struktur maka radikalisme akan punya landasan untuk berani, lebih radikal, lebih militan, dan lebih luas. Demikian pula bila ada perluasan struktur maka front - front persatuan akan lebih menemukan wadahnya.

Dari 26 Agustus 2009 sampai 8 Januari 2012, tercatat 64 kali aksi warga Padang bersama STR dan NGO. Mulai dari pertemuan, bangun posko, hingga jahit mulut. Artinya, turun ke jalan dengan cara damai mereka tempuh. Sekalipun tak pernah anarkis.

Konflik Masyarakat Pulau Padang dengan PT. RAPP di Pulau Padang kabupaten Kepulauan Meranti dimulai sejak tahun 2009 sebelum Kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten induk Bengkalis. Kronologis kasus dan aksi ini dijelaskan oleh hasil laporan yang dilakukan oleh Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK - HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. (SK.736/Menhut - II/2011 tanggal 27 Desember 2011)

1. Perluasan Struktur/Cabang

Pembangunan struktur/cabang adalah penting. Struktur/cabang sebaiknya diikuti dengan pengadaan sekretariat sebagai sumber informasi, sumber konsolidasi dan sumber koordinasi. Guna memudahkan konsolidasi dan koordinasi, sebuah sekretariat didirikan oleh 15 – 30 orang yang tinggal berdekatan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan penulis dalam penelitian ini, STR adalah lembaga yang terstruktur hingga ke tingkat desa dengan tujuan dapat mengakomodir petani secara menyeluruh agar lebih mudah dalam melakukan koordinasi secara langsung.

Penjelasan mengenai perluasan struktur atau cabang kepengurusan terdapat pada AD ART STR yang menjelaskan tugas dan kewenangan setiap organ struktur dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan koordinasi.

2. Pembangunan Kesatuan - Kesatuan (front -front) Demokratik

Dalam membangun dan memperluas Kesatuan, tema demokrasi baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, militer, dan lain sebagainya, merupakan landasan ikrar - kesetiaan untuk menuntaskan persoalan - persoalan mendesak rakyat. Untuk menjaga arah politik front persatuan diperlukan prinsip - prinsip pokok yang dijadikan pedoman dalam penggalangan dan perjuangan front persatuan. Prinsip -

prinsip itu menjadi rambu - rambu sekaligus petunjuk operasional pekerjaan front persatuan.

3. Radikalisasi Gerakan

Mobilisasi Propaganda, Mobilisasi propaganda adalah upaya - upaya Penyadaran. Dilakukan dari tingkat pusat/nasional sampai tingkat dusun/RW. Apakah itu talk show, wawancara, menulis di koran, pendidikan, pertunjukan - pertunjukkan kesenian, pembagian selebaran, penjualan koran serta forum - forum diskusi lainnya. Rapat akbar adalah salah satu bentuk mobilisasi propaganda juga karena peserta diharapkan mendengarkan dengan saksama pidato - pidato dari mimbar.

Mobilisasi Aksi Menuntut, jika kegiatan penyadaran telah berhasil membangkitkan kesadaran maka langkah selanjutnya adalah mengadakan aksi kepada pihak yang paling bertanggung jawab.

Sejauh ini, STR berperan aktif dalam melakukan penyadaran dan menggerakkan kepentingan masyarakat Pulau Padang.

Selain itu pergerakan serikat tani riau dalam mobilisasi juga terdapat dalam salah satu media massa yang memberitakan tentang “Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR) menggelar rapat akbar di lapangan sepak bola Sei Anak Kamal, Pulau Padang, Kamis (10/5/2012)”.

C. Bentuk-Bentuk Konflik Yang Terjadi Di Pulau Padang

Tadjuddin Noer Effendi (Agus, Surata) mengatakan bahwa konflik sosial secara teoritis dapat terjadi dalam berbagai tipe atau bentuk yaitu konflik secara vertikal dan konflik secara horizontal. Konflik yang terjadi di Pulau Padang merupakan konflik yang berbentuk vertikal dan semakin diperkuat dengan adanya konflik horizontal. Dengan alasan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT.RAPP semakin

berlanjut karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap perusahaan serta adanya bentuk ketimpangan dalam penggarapan yang dilakukan pihak perusahaan PT.RAPP di kawasan Pulau Padang hal ini diperkuat lagi dengan adanya konflik antara sesama masyarakat yang membuat konflik ini semakin besar.

1. Kronologis Perizinan HTI PT.RAPP di Pulau Padang

PT.RAPP (PT.Riau Andalan Pulp And Paper) merupakan perusahaan swasta nasional yang tergabung dalam kelompok APRIL (Asia Pacific Resources International Ltd). Yang bergerak di bidang pengusahaan hutan serta industri pengelolaan hasil hutan, khususnya industri pulp dan kertas. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989. PT.RAPP memperoleh areal kerja secara definitif pertama kali melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.130/Kpts-II/1993 pada tanggal 27 Februari 1993 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Nomor 137/Kpts-II/1997 tanggal 10 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.356/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, PT.RAPP diberikan IUPHHK-HTI pada hutan Produksi lebih kurang 235.140 Ha. Areal izin PT.RAPP berdasarkan SK tersebut di atas, berada di empat Kabupaten di Provinsi Riau yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi.³

Pada tahun 2009 PT.RAPP telah mendapatkan penambahan atau perluasan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) melalui Surat Keputusan SK.327/Menhut-II/2009 pada tanggal 12 Juni 2009 seluas 115.025 Ha. Sehingga saat ini luas areal PT.RAPP adalah 350.165 Ha, termasuk areal seluas 41.205 Ha berada di Pulau Padang. luas lahan 41.205 Ha ini lah yang di permasalahan oleh masyarakat Pulau Padang.

³ Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan IUPHHK-HT PT.RAPP.2004.Pekanbaru. Hal II-I

2. Dinamika Konflik di Pulau Padang

Konflik sosial yang terjadi di Pulau Padang yaitu antara masyarakat dengan pihak perusahaan PT.RAPP terjadi sejak lahirnya SK 327/Menhut-II/2009, masyarakat Pulau Padang mulai resah dikarenakan izin yang dikantongi oleh perusahaan tersebut telah ditemukan banyak permasalahan. Belum lagi terkait dengan persoalan lingkungan di Pulau Padang yang terletak di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berlakunya SK yang di keluarkan oleh pemerintah kepada pemilik perusahaan, tanpa ada partisipasi dengan masyarakat yang tinggal di Pulau Padang, perusahaan mulai menggarap sebagian dari lahan hutan yang terletak di Pulau Padang tepatnya di Senalit bagian dari desa Lukit Kecamatan Merbau.

Beroperasinya perusahaan PT.RAPP di Pulau Padang mulai di ketahui oleh masyarakat, dimana secara diam-diam masyarakat mengintip kepastian dari proses kerja alat berat milik perusahaan PT.RAPP, dilapangan ternyata beberapa masyarakat menemukan dan melihat langsung bahwa memang benar PT.RAPP telah masuk ke kawasan Pulau Padang.

Masyarakat menganggap perusahaan telah mengambil lahan milik mereka. Pada saat itu informasi mengenai beroperasinya alat berat milik perusahaan belum di ketahui oleh banyak pihak, karena dari pihak masyarakat yang berada di desa Lukit tepatnya di daerah garapan lahan oleh perusahaan, masih meminta agar perusahaan bisa memberi penjelasan mengenai masuknya perusahaan dan bisa menyelesaikannya permasalahan perizinan yang bermasalah tersebut secara baik-baik.

Tetapi, kenyataan dilapangan keinginan sebagian masyarakat tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Dari pihak perusahaan tidak merespons permintaan dari masyarakat. Malahan beberapa dari masyarakat perwakilan dari Pulau Padang harus berhadapan dengan penjaga (*security*) pintu masuk perusahaan

PT.RAPP di Pulau Padang. Sehingga warga merasa kecewa dan marah terhadap sikap dari perusahaan.

Mereka menyangkan sikap perusahaan yang tidak transparan dan secara-diam-diam telah menggarap sebagian lahan hutan milik Pulau Padang. Dimana hutan tersebut merupakan sumber mata pencaharian sebagian masyarakat Pulau Padang. Dari pihak perusahaan sudah dapat dinilai bahwa mereka tidak memiliki hubungan sosial yang baik dengan masyarakat.

Sehingga dengan sikap yang tidak seharusnya terjadi membuat masyarakat menyebarluaskan berita atau informasi ini kepada masyarakat yang ada di Pulau Padang lainnya. Dari kejadian inilah peristiwa konflik sosial di Pulau Padang tepatnya di Kecamatan Merbau terjadi. Dimana konflik ini terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT.Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP).

Memang tidak semua masyarakat Pulau Padang yang menolak masuknya PT.RAPP. Ada beberapa diantaranya malah bekerja di kawasan HTI milik perusahaan tersebut. Tetapi jika dibandingkan dengan yang Pro, lebih banyak terlihat masyarakat yang kontra dari pada yang pro terhadap perusahaan.

Setelah berita terkait peristiwa konflik Pulau Padang mulai di beritakan di media massa dan telah menyebar ke dunia Internasional, konflik yang terjadi di Pulau Padang ini menimbulkan berbagai macam Pro dan Kontra di berbagai kalangan. Baik itu dari masyarakat yang ada di Pulau Padang maupun dari luar.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai konflik Konflik Pulau Padang di dasarkan pada penelitian yang dilakukan penulis pada Januari 2013 dengan melakukan observasi di lapangan, serta wawancara langsung dengan mengambil delapan responden dari masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau yang terlibat langsung pada

konflik sosial di Pulau Padang. Dan dapat di simpulkan bahwa bentuk-bentuk konflik di Pulau Padang sebagai berikut : masyarakat menolak beroprasinya PT.RAPP di kawasan Pulau Padang dengan melakukan berbagai macam aksi protes ke pihak perusahaan sampai ke Pemerintah pusat. Adapun aksi-aksi yang dilakukan tersebut yaitu:

1. Aksi demo
2. Aksi jahit mulut
3. Ancaman aksi bakar diri kepada Presiden SBY
4. Pendirian tugu sebagai bentuk penolakan PT.RAPP di Pulau Padang.
5. Dan terjadinya konflik antar masyarakat di Pulau Padang.

konflik ini bersifat vertikal dan diperkuat dengan konflik horizontal. Adapun penyebab dari konflik tersebut yaitu :

- 1) Faktor ekonomi
- 2) Faktor politik dan
- 3) Faktor sosial

Solusi penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT.RAPP ini memang sudah di janji-janjikan oleh pihak pemerintah seperti melakukan konsiliasi dan mediasi. Tetapi peristiwa yang telah terjadi sejak akhir tahun 2009 hingga tahun 2013 ini belum juga terselesaikan dan belum menemukan titik terangnya.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian dilapangan yaitu sebagai berikut :

1. Kepada perusahaan, hendaknya bersikap transparan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik di Pulau Padang.
2. Kepada pemerintah, hendaknya segera merevisi ulang SK 327 yang di keluarkan oleh Kemenhut secara arif dan bijaksana.
3. Kepada masyarakat, agar tetap mempertahankan keamanan di Pulau Padang dan memberi kesempatan kepada pemerintah dan

instansi terkait dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi di Pulau Padang.

Mudah-mudahan hasil dari penelitian ini bisa memberikan manfaat positif yang dapat menyumbang pemikiran bagi pengembangan Ilmu Sosiologi, khususnya dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik sosial. Serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti lainnya dalam penelitian lebih lanjut bagi perkembangan dunia akademis pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- BN.Marbun, SH, 2003 *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bruce J Cohen, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta
- James W. Vander Zanden, 1990, *The Social Experience : An Introduction To Sociology*, McGraw-Hill Publishing, New York
- Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*, FEUI, Jakarta,
- Kartasapoetra, G dan Kreimers, L.J.B, 1987, *Sosiologi Umum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Manulang, 2004, *Pedoman Teknis Menulis Skripsi*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mariam Budiarto, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Robert Mirel, 2004, *Teori Pergerakan Sosial: Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*, Resist Book, Jakarta.

Skripsi

- Amrina Rosyada, 2013, *Konflik Sosial Masyarakat Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti*, Universitas Riau, Pekanbaru.